



Laporan Kinerja Triwulan 3 BPMP Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Bengkulu selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	2.35	2.90
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	54.56	%	32.73	35.30
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	A	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu	93.68	Nilai	0.75	76.40

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

1. Optimalisasi Pemanfaatan Chromebook di Satuan Pendidikan

Kegiatan bimbingan teknis satuan pendidikan untuk optimalisasi *chromebook* bertujuan untuk meningkatkan penggunaan akun belajar.id dan pemanfaatan *chromebook* di level satuan pendidikan semua jenjang yang berada di 10 kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 7 s.d. 8 Juli tahun 2024 dan tanggal 11 s.d. 12 Juli 2024. Sasarannya adalah Kepala Sekolah dan guru-guru yang berasal dari satuan pendidikan penerima *chromebook*. Peserta yg hadir sebanyak 270 orang.

2. Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah

Kegiatan advokasi kebijakan layanan pendidikan inklusif kepada pemerintah daerah dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2024 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kegiatan diikuti oleh pejabat dan PIC Pendidikan Inklusif Dinas



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan advokasi ini adalah terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Kabupaten/Kota serta Provinsi dan terbitnya Surat Edaran Kepala Dinas bahwa seluruh sekolah wajib/tidak menolak menerima siswa berkebutuhan khusus jika ada yang mendaftar.

3. Advokasi dan Bimbingan Teknis Terkait Penggunaan Siplah bagi Pemeritah Daerah, dan Satuan Pendidikan Serta Pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki Komunitas Siar

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 September 2024. Kegiatan berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala pada kegiatan optimalisasi pemanfaatan *chromebook* di satuan pendidikan adalah
 - a. Pihak satuan pendidikan kurang menindaklanjuti pengimbasan pemanfaatan *chromebook* di level siswa;
 - b. Satuan pendidikan memiliki jaringan internet yang kurang mendukung;
 - c. Kemampuan TIK SDM pemantik kurang mendukung;
 - d. Belum adanya dukungan anggaran dan kegiatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kendala pada kegiatan advokasi kebijakan layanan pendidikan inklusif kepada pemerintah daerah adalah
 - a. Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum didukung oleh tenaga yang berkompeten dan belum ada yang melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya;
 - b. Kurangnya motivasi/dorongan dari kepala sekolah agar guru-guru mengikuti pendidikan berjenjang pendidikan inklusif melalui *Platform Merdeka Mengajar* (PMM).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan *chromebook* di satuan pendidikan adalah
 - a. Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM;
 - b. Visitasi terkait Pengimbasan PMM;
 - c. Dukungan pendampingan melalui webinar dan berbagi praktik baik.
2. Strategi yang dilakukan untuk kebijakan layanan pendidikan inklusif kepada pemerintah daerah adalah kegiatan advokasi peran dan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan sosialisasi diklat berjenjang pendidikan inklusif.

[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

1. Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak

Kegiatan forum pemangku kepentingan daerah program sekolah penggerak dilaksanakan *full day* di hotel pada 10 kabupaten/kota yang dimulai pada tanggal 4 s.d 8 Agustus tahun 2024. Forum Pemangku Kepentingan (FPK) melibatkan narasumber dari Fasilitator Sekolah Penggerak. Peserta FPK yang terlibat berasal dari perwakilan DPRD Kabupaten/Kota bidang pendidikan, Bappeda Kabupaten/Kota/Provinsi, PIC PMO kabupaten/kota, wali murid, siswa, peserta internal BPMP, perwakilan BGP, dan perwakilan kepala sekolah penggerak dengan jumlah peserta 230 orang. Tujuan dari FPK adalah meningkatkan komitmen dan peran serta dukungan setiap aktor forum dalam mendukung keberlanjutan Program Sekolah Penggerak.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

2. Koordinasi, Advokasi, Pendampingan Percepatan Pengimbasan Transformasi Satuan Pendidikan Program Sekolah Penggerak

Kegiatan advokasi, pendampingan percepatan pengimbasan transformasi satuan pendidikan program sekolah penggerak dilaksanakan di Hotel Santika Bengkulu pada tanggal 23 s.d. 25 September tahun 2024. Kegiatan melibatkan narasumber dari internal BPMP, Bappeda Provinsi Bengkulu dan Fasilitator Sekolah Penggerak. Peserta yang terlibat berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi, PIC PSP Kabupaten/Kota, Peserta BPMP dan perwakilan Kepala Sekolah Penggerak dengan jumlah peserta 88 peserta. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan komitmen dan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengimbasan transformasi Program Sekolah Penggerak.

3. Advokasi IKM dan Transformasi Digital untuk Pembelajaran bagi Pemerintah Daerah dan Komunitas Belajar Akun Belajar.Id

Kegiatan advokasi IKM dan transformasi digital untuk pembelajaran bagi pemerintah daerah dan komunitas belajar akun belajar.id dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 September tahun 2024 di Hotel Santika Kota Bengkulu. Sasaran peserta terdiri dari Petugas Pendamping Pemanfaatan TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi Bengkulu, dan pengurus Komunitas Belajar akun belajar.id sebanyak 74 orang.

4. Pendampingan Penguatan Intervensi Pemulihan Pembelajaran Oleh UPT Tahap II

Kegiatan pelepasan Program Kampus Mengajar (PKM) Angkatan 8, dan melaksanakan supervisi bagi mahasiswa PKM 8 sebelum melaksanakan kegiatan di sekolah sasaran ini dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024. Sasaran adalah 224 peserta melalui *zoom meeting* (daring) dengan unsur yang terdiri dari Koordinator/PIC Perguruan Tinggi PKM 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari delapan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan Guru Pamong Sekolah Penugasan, serta Dosen Pembimbing Lapangan,

5. Pemantauan dan Pengolahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan PPDB

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2024. Sasaran adalah satuan pendidikan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu yang sedang melaksanakan PPDB tahun 2024.

6. Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan Tes Kefugaran Siswa Indonesia (TKSI) di Satuan Pendidikan Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin s.d. Rabu, 29 s.d. 31 Juli tahun 2024 di BPMP Provinsi Bengkulu. Peserta yang diundang sebanyak 67 orang dengan melibatkan Tim Pembina UKS Provinsi Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan Tim Pembina UKS/Guru PJOK pada Satuan Pendidikan Se Provinsi Bengkulu. Narasumber yang menyampaikan adalah 2 orang PIC Pusat.

7. Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT

Kegiatan dilaksanakan menggunakan fasilitas *google-sheet* berisi data sub-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya maka BPMP Provinsi Bengkulu tidak melakukan pendampingan tatap muka pada Pemda, akan tetapi mengirimkan satu surat dengan Nomor: 0944-0954/C7.11/KL.00.01/2024 tentang permohonan data realisasi anggaran APBD Tahun 2024 tertanggal 8 Juli 2024. Melalui surat tersebut di atas, BPMP Provinsi Bengkulu memohon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk mengisi data pada *google-sheet link* yang tertera dalam surat. Hingga akhir batas waktu yang ditentukan, semua data realisasi SPM Pendidikan Semester I Tahun 2024 dari provinsi, kabupaten, dan kota telah diunggah ulang oleh BPMP Provinsi Bengkulu ke dalam *google-sheet* yang disediakan PDM-04B Pusat untuk Provinsi Bengkulu.

8. Persiapan Pendampingan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT

Kegiatan yang dilakukan pada bulan September ini adalah persiapan kegiatan Pendampingan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

9. In House Training Pembekalan dan Penyamaan Persepsi Calon Narasumber Workshop Kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar serta penguatan dan advokasi tim teknis posko/helpdesk AN kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 di BPMP Provinsi Bengkulu yang diikuti oleh 11 orang peserta.

10. Workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar serta Penguatan dan Advokasi Tim Teknis Posko/Helpdesk Asesmen Nasional Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 Juli 2024 di BPMP Provinsi Bengkulu dengan jumlah sasaran 60 orang.

11. Monitoring dan Advokasi persiapan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Agustus 2024 dan 26 s.d 28 September 2024 di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dengan sasaran 80 satuan pendidikan, serta melibatkan 3 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota.

12. Pemantauan pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMA sederajat di Provinsi Bengkulu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Agustus 2024 di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dengan sasaran 68 satuan pendidikan, serta melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten/kota.

13. Pemantauan pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP sederajat di Provinsi Bengkulu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 12 September 2024 di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dengan sasaran 68 satuan pendidikan, yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota.

14. Pendampingan Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Juli tahun 2024. Jumlah sasaran adalah 82 satuan pendidikan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu dengan tujuan mendorong melakukan refleksi dan merencanakan kegiatan untuk perbaikan mutu pendidikan.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala pada kegiatan forum pemangku kepentingan daerah program sekolah penggerak adalah
 - a. Kuantitas kehadiran aktor pendukung dalam kegiatan FPK PSP kurang maksimal (terutama unsur DPRD);
 - b. Kualitas keterlibatan peserta Forum Pemangku Kepentingan yang hadir kurang maksimal.
2. Kendala pada kegiatan advokasi, pendampingan percepatan pengimbasan transformasi satuan pendidikan program sekolah penggerak adalah kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap Program Sekolah Penggerak.
3. Kendala pada kegiatan advokasi IKM dan transformasi digital untuk pembelajaran bagi pemerintah daerah dan komunitas belajar akun belajar.id adalah
 - a. Kemampuan TIK SDM pemantik kurang mendukung;
 - b. Tidak adanya dukungan anggaran dan kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan untuk kegiatan peningkatan kapasitas di bidang TIK.
4. Kendala pada kegiatan pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap II adalah
 - a. Pelepasan dan supervisi PKM 8 tidak dihadiri oleh semua unsur terkait;
 - b. kegiatan dilaksanakan secara daring.
5. Kendala pada kegiatan Pemantauan dan Pengolahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan PPDB adalah
 - a. Pemahaman tentang TPPK, KSPS, dan PPDB belum maksimal;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

b. Kurangnya respon Pemerintah Daerah terhadap kegiatan PPDB.

6. Kendala pada kegiatan Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT adalah tidak semua pejabat/staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung mengisi data yang dibutuhkan pada *google sheet link* yang tertera dalam surat BPMP Provinsi Bengkulu sampai batas waktu yang ditetapkan dalam surat pertama tidak dapat terpenuhi, dan bahkan terdapat 3 (tiga) Dinas yang tidak merespon hingga batas waktu kedua.

7. Kendala pada kegiatan monitoring dan advokasi persiapan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Terdapat satuan pendidikan yang tidak mengikuti asesmen nasional/sulingjar.

8. Pada pelaksanaan ANBK terdapat kendala yaitu

- a. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai POS dan Juknis AN seperti tidak ada pengawasan silang dan pengaturan tempat duduk untuk peserta;
- b. Terdapat satuan pendidikan khususnya PKBM yang tidak melaksanakan asesmen nasional tahun 2024 pada jadwal yang telah dipilih.

9. Kendala pada pendampingan pemanfaatan rapor pendidikan dalam rangka transformasi satuan pendidikan adalah

- a. Pada satuan PAUD masih banyak pengelola satuan pendidikan yang belum memiliki akun belajar.id;
- b. Pengelola satuan pendidikan lupa password akun belajar.id;
- c. Satuan pendidikan sudah tidak aktif lagi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Strategi yang dilakukan pada kegiatan forum pemangku kepentingan daerah program sekolah penggerak dan kegiatan advokasi, pendampingan percepatan pengimbasan transformasi satuan pendidikan program sekolah penggerak adalah

- a. Penguatan Peran Pemda dalam Fasilitasi Transformasi Satuan Pendidikan;
- b. Koordinasi PMO PSP level daerah (Pemecahan Masalah dan Penyegaran 5 Intervensi).

2. Strategi yang dilakukan pada kegiatan advokasi IKM dan transformasi digital untuk pembelajaran bagi pemerintah daerah dan komunitas belajar akun belajar.id adalah

- a. Meningkatkan level capaian terkait kemampuan literasi dan numerasi, indeks pembelajaran, dan perubahan karakter peserta didik pada hasil asesmen nasional;
- b. Meningkatkan intensitas kegiatan, mengaktivasi komunitas belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola komunitas belajar akun belajar.id di masing-masing daerah;
- c. Menjalin komunikasi dengan PemanTIK daerah untuk menyiapkan RTL menuju *objektive* PDM03B.

3. Strategi pada kegiatan pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap II adalah

- a. Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam wadah FKK Bulanan pada minggu kedua setiap bulannya;
- b. Membuat sarana komunikasi menampung masalah dalam bentuk *Whatsapp Group* masing-masing komponen.

4. Strategi pada kegiatan Pemantauan dan Pengolahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan PPDB adalah

- a. Koordinasi dalam Tim Kerja;
- b. Meningkatkan sosialisasi Sistem Aplikasi KSPS, TPPK, dan Juknis PPDB oleh Dinas Pendidikan pada Pemerintah Daerah.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5. Tindak lanjut pada kegiatan Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT adalah menggunakan pendekatan personal untuk daerah yang belum mengisi seperti

- a. Sekretaris Dinas Kota Bengkulu;
- b. Konsultan ahli Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

6. Peserta *Workshop* Kebijakan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar serta Penguatan dan Advokasi Tim Teknis Posko/Helpdesk Asesmen Nasional Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 hanya mampu mengundang tim teknis untuk setiap jenjang (SD, SMP, SMA dan PKBM) sehingga diharapkan peserta/tim teknis melakukan pengimbasan dan informasi *update* yang didapat dalam *workshop* kepada teknisi lainnya di kabupaten/kota asal.

7. BPMP Provinsi Bengkulu merencanakan

- a. Melakukan monitoring dan advokasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan satuan pendidikan untuk memastikan ada/tidaknya satuan pendidikan yang tidak mengikuti asesmen nasional/sulingjar atau mengikuti asesmen nasional/sulingjar namun partisipasinya kurang memadai pada tahun 2023 sehingga diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional tahun 2024
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada tim teknis kabupaten/kota melalui whatsapp group untuk mengingatkan proktor/teknisi agar melihat kembali POS dan Juknis AN agar saat pelaksanaan asesmen nasional tahun 2024 tidak terjadi lagi pelanggaran seperti tidak ada pengawasan silang dan tidak ada pengaturan tempat duduk untuk peserta.
- c. Berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota/provinsi untuk PKBM yang tidak melaksanakan asesmen nasional tahun 2024 pada jadwal yang telah dipilih dan mempersiapkan untuk mengikuti penjadwalan ulang (PU) yang akan dilaksanakan pada bulan September 2024.

8. Strategi pada pendampingan pemanfaatan rapor pendidikan dalam rangka transformasi satuan pendidikan adalah

- a. Bekerja sama dengan kapten/co kapten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota/provinsi untuk pembuatan akun belajar.id;
- b. Meminta sekolah untuk melakukan reset password;
- c. Mengganti sasaran dengan sekolah yang masih aktif.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu

Progress/Kegiatan

Untuk mencapai predikat A pada IKK 2.1 BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian aktivitas pada triwulan 3 yaitu

1. Melakukan rapat internal perencanaan program dan persiapan kegiatan tahun 2024, baik secara daring maupun luring;
2. Mengikutsertakan tiga orang staf BPMP Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 September s.d. 05 Oktober 2024 Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek, dengan moda dalam jaringan (daring)/online;
3. Mencermati kembali RKAKL sesuai hasil revisi, melakukan revisi POK, menyempurnakan TOR kegiatan, melakukan pelaporan output bulanan 3 kali (sebelum tanggal 5 setiap bulan);
4. Peningkatan kualitas SDM pendidikan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Jurnalistik dan Penyusunan Konten Media Sosial BPMP Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2024 mengundang 25 orang peserta yang terdiri dari 14 orang peserta internal dari BPMP Provinsi Bengkulu dan 11 orang peserta eksternal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
5. Melakukan pengelolaan aset BMN dengan mengajukan permohonan pengusulan pemusnahan BMN



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- melalui lelang atau BMN yang sudah rusak berat/ habis masa pakai.
6. Melakukan evaluasi bersama pimpinan untuk melihat ketercapaian target.

Kendala/Permasalahan

Pada triwulan ketiga ini kendala utama yang dihadapi BPMP Provinsi Bengkulu dalam mencapai target adalah belum meratanya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya SAKIP di antara staf BPMP Provinsi Bengkulu.

Strategi/Tindak Lanjut

Permasalahan tersebut di atas telah dilakukan mitigasi dan untuk meminimalkan risiko BPMP Provinsi Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi, IHT tentang objektif-objektif yang akan dicapai setiap PIC dan menyusun rencana kerja yang lebih terukur secara *cascading* dan dapat dimonitor dengan baik.

[SK 2] Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu

Progress/Kegiatan

BPMP Provinsi Bengkulu tahun 2024 telah melakukan beberapa kegiatan/aktivitas untuk mencapai target ini yaitu :

1. Melakukan revisi POK menyesuaikan dengan hasil pemantauan Setditjen PDM;
2. Melakukan pengajuan TUP, GUP, LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Laporan Pajak, review IKPA dan Pengajuan Gaji PN/PPNPN.
3. Menyampaikan laporan penerimaan triwulan III, dan menyampaikan laporan PNBPN... kali;
4. Melakukan estimasi serapan anggaran dengan revisi Hal III DIPA;
5. Melaksanakan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
6. Melaksanakan pelaporan keuangan pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
7. Melaksanakan sinkronisasi BMN pada aplikasi SAKTI tepat waktu.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi BPMP Provinsi Bengkulu dalam mencapai target ini adalah

1. Penanggungjawab kegiatan (PIC) belum semua melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ada di DIPA serta revisi DIPA;
2. Nilai serapan anggaran yang tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan seringkali lebih lama dari perkiraan semula. Hal ini berimbas pada jadwal penyerapan anggaran juga tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut

Langkah yang dilakukan BPMP Provinsi Bengkulu adalah

1. Tim perencanaan dan PPK melakukan rapat rutin agar persiapan pelaksanaan kegiatan dapat



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

berjalan lebih cepat;

2. PPK mengingatkan PIC untuk tepat waktu melaksanakan kegiatan melalui ketua tim kerja;
3. Kuasa Pengguna Anggaran meminta operator *MS Project* melaporkan apabila tenggat waktu kegiatan hampir terlewati.


C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	2025	809	1216	Rp8.518.801.000	Rp4.538.969.364	Rp3.979.831.636
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	2111	1900	211	Rp147.520.000	Rp103.252.050	Rp44.267.950
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp488.050.000	Rp162.494.720	Rp325.555.280
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp17.953.564.000	Rp14.062.164.774	Rp3.891.399.226
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp1.100.850.000	Rp626.047.500	Rp474.802.500
[WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp504.313.000	Rp103.689.174	Rp400.623.826
Total Anggaran					Rp28.723.098.000	Rp19.596.617.582	Rp9.126.480.418

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Berupaya lebih berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong keterlibatan PKBM dalam ANBK dan Survey Lingkungan Belajar (Sulingjar).
2. Berkoordinasi dengan PPK untuk melakukan penganggaran agar dapat memfasilitasi PKBM dalam pelaksanaan Program Prioritas.
3. Lebih insentif untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bengkulu, 31 Oktober 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Penjaminan Mutu
 Pendidikan Provinsi Bengkulu
 Widyati Rosita



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

